



Kebijakan pendidikan pada era reformasi terhadap sistem pendidikan di Indonesia

Ayna Ayu Farikha¹, Sri Minarti²

^{1,2} Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri Bojonegoro, Indonesia

Email: farikhaaynaayu@gmail.com¹, minarti@unugiri.ac.id²

*Corresponding Author: farikhaaynaayu@gmail.com

ABSTRACT

This study aims to examine educational policies during the Reform Era and their impact on the education system in Indonesia. The research employed a descriptive qualitative approach using library research and interviews. The data were obtained from scientific journal articles and interviews with relevant informants. Data collection techniques were carried out by identifying, collecting, and reviewing sources related to educational policies during the Reform Era. Data analysis was conducted descriptively and qualitatively through data reduction, data presentation, and conclusion drawing. The results of the study indicate that the Reform Era brought significant changes to the education system in Indonesia, particularly through educational decentralization policies, curriculum reforms, improvement of teacher quality, and the implementation of school-based management. Curriculum changes from the Competency-Based Curriculum (KBK), School-Based Curriculum (KTSP), Curriculum 2013, to the Merdeka Curriculum demonstrate the government's efforts to improve the quality of education in accordance with the development of the times and students' needs. However, the implementation of educational policies still faces several challenges, such as disparities in educational quality between regions and limitations in educational resources.

Keywords: Curriculum, Educational policy, Reform era

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kebijakan pendidikan pada era Reformasi serta dampaknya terhadap sistem pendidikan di Indonesia. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi kepustakaan (library research) dan wawancara. Data penelitian diperoleh dari berbagai artikel jurnal ilmiah serta hasil wawancara dengan narasumber yang relevan. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui identifikasi, pengumpulan, dan penelaahan sumber-sumber yang berkaitan dengan kebijakan pendidikan pada era Reformasi. Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif melalui proses reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa era Reformasi membawa perubahan besar dalam sistem pendidikan di Indonesia, terutama melalui kebijakan desentralisasi pendidikan, perubahan kurikulum, peningkatan kualitas guru, dan penerapan manajemen berbasis sekolah. Perubahan kurikulum mulai dari KBK, KTSP, Kurikulum 2013, hingga Kurikulum Merdeka menunjukkan upaya pemerintah dalam meningkatkan mutu pendidikan agar lebih relevan dengan perkembangan zaman dan kebutuhan peserta didik. Meskipun demikian, implementasi kebijakan pendidikan masih



menghadapi berbagai tantangan, seperti kesenjangan kualitas pendidikan antar daerah dan keterbatasan sumber daya pendidikan.

Kata Kunci: *Era reformasi, Kebijakan pendidikan, Kurikulum*

PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan salah satu sektor penting dalam pembangunan bangsa yang berperan dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Kebijakan pendidikan di Indonesia tidak dapat dipisahkan dari dinamika politik yang berkembang, karena pendidikan pada dasarnya merupakan produk kebijakan publik yang dipengaruhi oleh sistem politik yang berlaku. Perubahan sistem politik akan berdampak langsung terhadap arah dan kebijakan pendidikan nasional, termasuk pada era Reformasi.

Perubahan besar dalam sistem pendidikan Indonesia terjadi setelah peristiwa Reformasi 1998 yang membawa perubahan dari sistem pemerintahan yang sentralistik menuju sistem yang lebih demokratis. Era Reformasi membuka peluang bagi pembaruan di berbagai sektor, termasuk pendidikan, dengan menekankan prinsip demokratisasi, transparansi, dan desentralisasi. Reformasi ini memberikan harapan baru terhadap perbaikan kualitas pendidikan di Indonesia. (Maghfuri, 2020)

Dalam era Reformasi, pemerintah melakukan berbagai perubahan kebijakan pendidikan, seperti desentralisasi pendidikan, perubahan kurikulum, serta peningkatan peran masyarakat dalam pengelolaan pendidikan. Kebijakan tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk meningkatkan mutu pendidikan nasional dan menyesuaikan dengan tuntutan globalisasi. Reformasi pendidikan juga dengan ditandai perubahan paradigma pendidikan dari yang bersifat indoktrinatif menuju pendidikan yang lebih demokratis dan partisipatif. (Samsuri, 2011)

Meskipun berbagai kebijakan telah diterapkan, implementasi kebijakan pendidikan pada era Reformasi masih menghadapi berbagai tantangan. Beberapa di antaranya adalah kesenjangan kualitas pendidikan antar daerah, keterbatasan sumber daya, serta belum meratanya pelaksanaan kebijakan di tingkat sekolah. Namun demikian, kebijakan pendidikan pada era Reformasi juga menunjukkan adanya perkembangan yang signifikan, seperti meningkatnya indeks pembangunan manusia dan akses terhadap pendidikan. (Risqa Oktarina, Dini Wahyuni, Fera Handayani, 2021)

Selain itu, reformasi pendidikan juga terus berkembang seiring dengan tuntutan zaman, termasuk dalam menghadapi globalisasi dan transformasi digital. Berbagai kebijakan pendidikan terus diperbarui untuk menciptakan sistem pendidikan yang lebih adaptif, inovatif, dan relevan dengan kebutuhan masyarakat modern. Hal ini menunjukkan bahwa reformasi pendidikan merupakan proses yang berkelanjutan dan dinamis. (Prastiwi et al., 2025)

Era Reformasi membawa perubahan besar dalam berbagai bidang kehidupan di Indonesia, termasuk bidang pendidikan. Sistem pendidikan yang



sebelumnya bersifat sentralistik mulai mengalami perubahan menuju sistem yang lebih demokratis dan terbuka. Perubahan tersebut meliputi desentralisasi pendidikan, pergantian kurikulum, peningkatan kualitas guru, hingga penerapan manajemen berbasis sekolah.

Berdasarkan uraian tersebut, penting untuk mengkaji secara mendalam kebijakan pendidikan pada era Reformasi serta dampaknya terhadap sistem pendidikan di sekolah. Kajian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai perkembangan, tantangan, serta implikasi kebijakan pendidikan di Indonesia pada era Reformasi.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi kepustakaan (*Library research*) dan wawancara. Metode ini digunakan untuk mengkaji dan menganalisis kebijakan pendidikan pada era Reformasi berdasarkan sumber-sumber tertulis serta informasi yang diperoleh melalui wawancara. Data yang digunakan terdiri atas data sekunder yang diperoleh dari artikel jurnal ilmiah dan data primer yang diperoleh melalui wawancara dengan narasumber yang relevan dengan topik penelitian. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara mengidentifikasi, mengumpulkan, dan menelaah berbagai jurnal yang relevan serta melakukan wawancara untuk memperoleh informasi yang mendukung penelitian.

Teknik analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif, yaitu dengan mereduksi, menyajikan, dan menarik kesimpulan dari data yang telah dikumpulkan, baik dari hasil studi kepustakaan maupun wawancara, untuk memperoleh gambaran yang sistematis mengenai kebijakan pendidikan serta dampaknya terhadap sistem pendidikan di sekolah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Kebijakan pendidikan era reformasi

Pendidikan menjadi salah satu hal yang memiliki peran penting dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia, serta menjadi kebutuhan untuk selalu berproses dan sarana agar manusia dapat berkembang di dunia luar. Pendidikan nasional menjadi bagian dari pembangunan nasional Indonesia. Indonesia merupakan salah satu negara yang memprioritaskan pendidikan, perubahan-perubahan selalu dilakukan untuk mengembangkan dan menjadikan pendidikan Indonesia ke kualitas yang lebih baik. Perubahan dituntut setelah runtuhnya rezim orde baru, berbagai suara menuntut haknya untuk memaksimalkan pembangunan bangsa yang lebih adil dan merata.

Selama orde baru dianggap tidak membawa Indonesia kearah yang lebih baik, pada masa tersebut pembangunan banyak dilakukan hanya di pusat dan daerah tertentu saja. Hal tersebut menyebabkan banyak kritikan yang muncul dan menghasilkan reformasi baru. Undang-undang No. 22 Tahun 1999 dan Undang-undang No. 5 Tahun 1977 diganti dengan Undang-undang No. 32 Tahun 2004, yang menyebabkan kewenangan pemerintahan daerah meningkat serta memberikan



kebebasan dan kekuasaan, agar dapat menyelenggarakan urusan-urusan rumah tangga di daerahnya masing-masing. (Mahdiyah et al., 2025)

Perubahan kebijakan pendidikan pada era reformasi tidak hanya berhenti pada aspek desentralisasi, tetapi juga menyentuh perubahan paradigma pendidikan yang lebih demokratis. Pendidikan tidak lagi dijadikan sebagai alat legitimasi kekuasaan seperti pada masa sebelumnya, melainkan diarahkan untuk membentuk warga negara yang kritis, partisipatif, dan berkarakter. Hal ini terlihat dari perubahan kurikulum dan penekanan pada pendidikan kewarganegaraan yang lebih demokratis dan berbasis nilai-nilai partisipatif. (Samsuri, 2011)

Selain itu, lahirnya Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Tahun 2003 menjadi tonggak penting dalam reformasi pendidikan di Indonesia. Undang-undang ini menegaskan bahwa pendidikan harus diselenggarakan secara demokratis, berkeadilan, dan tidak diskriminatif, serta menjunjung tinggi hak asasi manusia. Reformasi ini juga memberikan ruang bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam penyelenggaraan pendidikan, sehingga pendidikan tidak lagi bersifat sentralistik.

Masa reformasi menghendaki adanya perubahan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara ke arah yang lebih baik secara konstitusional. Artinya adanya perubahan kehidupan dalam bidang politik, ekonomi, pendidikan, hukum, sosial, dan budaya yang lebih baik, demokratis berdasarkan prinsip kebebasan, persamaan, dan persaudaraan. Perubahan yang sangat menonjol pada era reformasi adalah dilaksanakannya otonomi daerah sebagai implementasi dari UU No. 22/1999 yang kemudian diperbarui menjadi Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 memberikan otonomi yang lebih luas kepada daerah untuk mengelola pendidikan sesuai dengan kebutuhan lokal. (Limbong, n.d.)

Dalam implementasinya, kebijakan desentralisasi pendidikan memberikan dampak yang cukup kompleks. Di satu sisi, kebijakan ini memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengelola pendidikan sesuai dengan kebutuhan lokal, sehingga diharapkan mampu meningkatkan efektivitas dan relevansi pendidikan. Namun di sisi lain, muncul berbagai tantangan seperti ketimpangan kualitas pendidikan antar daerah, keterbatasan sumber daya, serta belum meratanya distribusi tenaga pendidik. (Khumaidi & Hamdani, 2024)

Pada awal era reformasi, jumlah guru di Indonesia mengalami peningkatan signifikan sebagai bagian dari upaya pemerataan pendidikan. Berdasarkan data Kementerian Pendidikan Nasional jumlah guru pada akhir 1990-an berkisar sekitar 1,5 juta orang, kemudian meningkat menjadi lebih dari 2,7 juta guru pada pertengahan 2000-an.

Meskipun jumlah guru meningkat distribusinya belum merata. Daerah perkotaan cenderung memiliki kelebihan guru, sementara daerah terpencil masih mengalami kekurangan tenaga pendidik. Reformasi pendidikan juga mendorong penerapan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) yang memberikan otonomi kepada sekolah dalam mengelola sumber daya. Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan partisipasi masyarakat dalam



pendidikan. Namun, implementasinya masih menghadapi kendala, terutama pada kesiapan sumber daya manusia di Tingkat sekolah.

Pemerintah pada era Reformasi juga mulai memperhatikan aspek kualitas tenaga pendidik. Hal ini terlihat dari diberlakukannya program sertifikasi guru setelah lahirnya Undang-Undang Guru dan Dosen Tahun 2005. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kompetensi profesional, pedagogik, sosial, dan kepribadian sekolah.

Program sertifikasi guru sangat membantu meningkatkan profesionalisme guru. Guru menjadi lebih termotivasi untuk meningkatkan kompetensi dan kualitas mengajar. Selain itu, adanya tunjangan profesi juga membantu meningkatkan kesejahteraan guru. Dengan kesejahteraan yang lebih baik, guru bisa lebih fokus dalam mendidik siswa.

Selain itu, peningkatan jumlah guru juga berdampak pada beban anggaran pemerintah, terutama setelah diberlakukannya kebijakan tunjangan profesi guru. Sejak tahun 2005, pemerintah mengalokasikan anggaran pendidikan sebesar minimal 20% dari APBN, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang. Sebagian besar anggaran tersebut digunakan untuk gaji dan tunjangan guru. Di satu sisi, hal ini meningkatkan kesejahteraan guru, tetapi di sisi lain menimbulkan tantangan dalam efisiensi anggaran Pendidikan. (Putri, 2025)

B. Kurikulum Era Reformasi

Perubahan kurikulum pada era Reformasi 1998 merupakan bagian penting dari upaya pembaruan sistem pendidikan di Indonesia. Kurikulum yang sebelumnya bersifat sentralistik mulai diarahkan menjadi lebih fleksibel, demokratis, dan menyesuaikan dengan kebutuhan peserta didik serta perkembangan zaman. Berikut ini adalah kurikulum di era reformasi:

1. Kurikulum berbasis Kompetensi (KBK)

KBK lahir di tengah-tengah adanya tuntutan mutu pendidikan di Indonesia. Banyak kalangan yang berpendapat bahwa mutu pendidikan di Indonesia semakin hari semakin terpuruk. Dalam KBK, peserta didik diarahkan untuk menguasai sejumlah kompetensi sesuai dengan standar yang telah ditentukan.

KBK diperkenalkan saat Prof. Dr. Abdul Malik Fadjar M. sc menjabat sebagai Menteri Pendidikan Nasional. Beberapa ketentuan dalam KBK meliputi: (1) berbasis pada Kompetensi; (2) perubahan nama Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) menjadi Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Sekolah Menengah Umum (SMU) menjadi Sekolah Menengah Atas (SMA); (3) kurikulum pengajaran untuk Sekolah Dasar (SD)/Madrasah Ibtidaiyah (MI) terdiri dari 8 mata pelajaran; (4) kurikulum pengajaran untuk SMP/Madrasah Tsanawiyah (MTs) terdiri dari 12 mata pelajaran; (5) kurikulum pengajaran untuk SMA/Madrasah Aliyah terdiri dari 17 mata pelajaran.

Melalui kebijakan dari pemerintah, KBK telah diperbarui, dengan diterbitkannya Permendiknas Nomor 22 mengenai Standar Isi,



Permendiknas Nomor 23 tentang Standar Kompetensi Lulusan, serta Permendiknas Nomor 24 tentang pelaksanaan kedua Permen tersebut. Ketiga Permendiknas ini dikeluarkan pada tahun 2006.(Aisyah, 2019)

2. Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) Tahun 2006

Secara umum, KTSP memiliki kesamaan dengan KBK, tetapi ada perbedaan yang signifikan. Mengingat bahwa KTSP didasarkan pada penerapan KBK, maka siswa diberikan peluang untuk mendapatkan pengetahuan secara terbuka sesuai dengan sistem atau kurikulum yang ditetapkan oleh masing-masing sekolah. Perbedaan utama terletak pada otoritas dalam pembuatannya, yang mengacu pada desentralisasi pendidikan. Pemerintah pusat menetapkan standar kompetensi serta kompetensi dasar, sedangkan di tingkat sekolah, guru dituntut untuk dapat mengembangkan silabus dan metode penilaian sesuai dengan situasi sekolah dan daerahnya. KTSP lebih menekankan pada konteks lokal dalam pendidikan.(MAMONTO, n.d.)

3. Kurikulum 2013 (K-13)

Kurikulum 2013 (K-13) adalah program pembelajaran yang diterapkan dalam sistem pendidikan di Indonesia. Program ini merupakan kurikulum yang ditetapkan oleh pemerintah untuk menggantikan Kurikulum 2006 yang telah diterapkan selama sekitar enam tahun.

Dalam Kurikulum 2013, terdapat perubahan pada isi pembelajaran, di mana beberapa materi dikurangi dan beberapa materi baru ditambahkan. Materi yang dikurangi bisa ditemukan dalam Bahasa Indonesia, IPS, PPKn, dan lain-lain, sementara materi baru muncul dalam Matematika. Kurikulum ini memiliki empat jenis penilaian, yakni penilaian pengetahuan, penilaian keterampilan, penilaian sikap, dan perilaku. Selain itu, Kurikulum 2013 ini mendorong siswa untuk lebih aktif dalam mencari sumber belajar lainnya di luar pengajaran guru, sehingga siswa memiliki kebebasan lebih dalam mencari pengetahuan dan dapat mengembangkan wawasan yang dimiliki.(MAMONTO, n.d.)

4. Kurikulum Merdeka (Kurmer)

Kurikulum Merdeka diperkenalkan pertama kali pada tahun 2022 dan secara resmi diakui sebagai kurikulum nasional pada tahun 2024. Kurikulum ini mencerminkan transformasi penting dalam sistem pendidikan nasional dengan menekankan kemandirian dalam belajar sebagai prinsip yang utama. Ide Merdeka Belajar dipahami sebagai proses pembelajaran yang alami, yang bertujuan untuk mendorong kebebasan berpikir dan kreativitas di dunia pendidikan, sekaligus mengembangkan potensi terbaik para guru dan siswa agar dapat berinovasi dan meningkatkan kualitas pembelajaran secara mandiri.



Dalam implementasinya, Kurikulum Merdeka memiliki ciri utama berupa pembelajaran berbasis proyek yang diarahkan pada penguatan soft skills dan pembentukan karakter sesuai dengan Profil Pelajar Pancasila. Profil tersebut mencakup enam dimensi pokok, yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, memiliki wawasan kebinekaan global, mampu bekerja sama atau bergotong royong, bersikap mandiri, memiliki kemampuan bernalar kritis, serta kreatif.

Penerapan Kurikulum Merdeka dimulai pada tahun ajaran 2022/2023 dan diperkuat melalui Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 56/M/2022 sebagai langkah strategis untuk mengatasi learning loss akibat pandemi COVID-19. Pelaksanaan Kurikulum Merdeka di tingkat SMA memberikan pengaruh positif yang signifikan terhadap kemajuan siswa, termasuk peningkatan semangat belajar, partisipasi aktif dalam proses pembelajaran, pencapaian hasil belajar, serta pembentukan karakter yang mandiri dan rasa tanggung jawab. (Dewa Ayu Made Manu Okta Priantini, Ni Ketut Suarni, 2022)

C. Kelebihan dan Kekurangan Kurikulum

Setiap perubahan kurikulum dalam sistem pendidikan nasional memiliki sisi keunggulan sekaligus keterbatasan masing-masing.

1. KBK: Keunggulan utama dari kurikulum ini adalah fokusnya pada penguasaan keterampilan yang relevan dengan kebutuhan sehari-hari, serta memberikan kesempatan bagi daerah untuk mengembangkan kurikulum dengan cara yang lebih mandiri.
2. KTSP: Kelebihan dari KTSP terlihat pada bertambahnya wewenang sekolah dalam merancang kurikulum, dengan partisipasi aktif masyarakat dalam pengembangannya.
3. Kurikulum 2013: Kurikulum ini memiliki keunggulan dalam memperkuat pendidikan karakter, penerapan pendekatan ilmiah yang mendorong kemampuan berpikir kritis, serta penggunaan penilaian yang sah. Namun, pada implementasinya masih ada banyak keluhan dari guru mengenai cara pelaksanaannya.
4. Kurikulum Merdeka: Kelebihan dari Kurikulum Merdeka meliputi kebebasan dalam proses belajar, fokus pada materi yang penting, penguatan karakter melalui Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila (P5), serta pengembangan kemandirian siswa. Kurikulum ini juga memberikan keleluasaan besar bagi lembaga pendidikan dan pengajar dalam menjalankan proses pembelajaran.

D. Dampak Perubahan Kurikulum dalam Pendidikan

Pergantian kurikulum di Indonesia sering kali menimbulkan perdebatan di tengah masyarakat, khususnya mengenai efektivitas kebijakan tersebut dalam meningkatkan mutu pendidikan atau malah menghadirkan permasalahan baru.



Namun demikian, sejumlah penelitian menunjukkan bahwa implementasi Kurikulum 2013 memberikan kontribusi terhadap peningkatan hasil belajar peserta didik. Selain itu, penerapan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) juga diharapkan mampu memberikan dampak positif terhadap prestasi belajar siswa. Di sisi lain, Kurikulum Merdeka yang hadir sebagai bentuk inovasi dalam sistem pendidikan dipandang memiliki potensi untuk memberikan pengaruh yang baik terhadap perkembangan peserta didik serta peningkatan kualitas pendidikan nasional.

Reformasi kurikulum di Indonesia mencerminkan adanya kesesuaian dengan tren global dalam kebijakan pendidikan, terutama dalam penguatan fokus terhadap penguasaan kompetensi utama peserta didik. Beberapa negara yang memiliki kualitas pendidikan tinggi, seperti Finlandia dan Singapura, menjadi contoh keberhasilan penerapan kebijakan pendidikan yang disusun berdasarkan bukti empiris sehingga mampu menciptakan sistem pendidikan yang efektif dan berkesinambungan. Keberhasilan tersebut didukung oleh kualitas tenaga pendidik yang profesional, berkompentensi tinggi, serta mendapatkan penghargaan dan tingkat kepercayaan yang besar dari masyarakat. (Supianah et al., 2026)

KESIMPULAN

Kebijakan pendidikan pada era Reformasi membawa perubahan yang signifikan terhadap sistem pendidikan di Indonesia. Perubahan tersebut terlihat melalui penerapan desentralisasi pendidikan, pembaruan kurikulum, peningkatan kualitas tenaga pendidik, serta penerapan manajemen berbasis sekolah. Reformasi pendidikan bertujuan menciptakan sistem pendidikan yang lebih demokratis, partisipatif, dan sesuai dengan perkembangan zaman. Pergantian kurikulum mulai dari KBK, KTSP, Kurikulum 2013, hingga Kurikulum Merdeka menunjukkan adanya upaya pemerintah untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan kompetensi peserta didik.

Meskipun berbagai kebijakan telah memberikan dampak positif terhadap peningkatan mutu pendidikan, pelaksanaannya masih menghadapi sejumlah tantangan, seperti ketimpangan kualitas pendidikan antar daerah, keterbatasan sarana dan prasarana, serta belum meratanya kualitas tenaga pendidik. Oleh karena itu, diperlukan evaluasi dan pengembangan kebijakan pendidikan secara berkelanjutan agar sistem pendidikan di Indonesia mampu menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas, berkarakter, dan mampu bersaing di era globalisasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Aisyah, S. (2019). PENDIDIKAN ISLAM PADA MASA REFORMASI (1998-SEKARANG). *Tarbiyah Islamiyah: Jurnal Ilmiah Pendidikan Agama Islam*, 9(2).
<https://doi.org/https://doi.org/10.18592/jtipai.v9i2.3159>
- Dewa Ayu Made Manu Okta Priantini, Ni Ketut Suarni, I. K. S. A. (2022). ANALISIS KURIKULUM MERDEKA DAN PLATFORM MERDEKA BELAJAR UNTUK MEWUJUDKAN PENDIDIKAN YANG



- BERKUALITAS. *JURNAL PENJAMINAN MUTU*, 8, 238–244.
- Khumaidi, A., & Hamdani, U. L. (2024). *Evaluasi dampak kebijakan desentralisasi pendidikan terhadap kualitas pendidikan di Indonesia*. 5(4), 468–481.
<https://doi.org/10.32832/idarah.v5i4.16859>
- Limbong, L. (n.d.). *Kebijakan Pendidikan Era Reformasi Indonesia*.
- Maghfuri, A. (2020). *ANALISIS POLITIK DAN KEBIJAKAN PENDIDIKAN ISLAM PADA AWAL ORDE REFORMASI (1998-2004)*. 8, 14–26.
- Mahdiyah, D., Ba'in2, & Soeharso, R. (2025). KURIKULUM DALAM BINGKAI DESENTRALISASI: KAJIAN KEBIJAKAN PENDIDIKAN INDONESIA MASA REFORMASI. *Jurnal Ilmiah Widya Pustaka Pendidikan*, 13, 64–74.
- MAMONTO, N. S. (n.d.). *Perkembangan Pendidikan Zaman Reformasi*.
- Prastiwi, M. W., Mustafiah, I., Jalaludin, A. A., & Dyah, G. (2025). Reformasi Pendidikan Indonesia sebagai Upaya Penerapan Transformasi Digital Pendidikan di Era Globalisasi. *Jurnal Pendidikan Anak Sekolah Dasar*, 1(1), 82–87.
- Putri, D. Y. (2025). Transformasi Pendidikan Indonesia di Era Reformasi : Analisis Perubahan, Tantangan, dan Harapan. *Jurnal Ilmiah Multi Disiplin*, 03(03), 1473–1483.
- Risqa Oktarina, Dini Wahyuni, Fera Handayani, J. (2021). PERKEMBANGAN HISTORIS KEBIJAKAN PENDIDIKAN (Kebijakan Pendidikan Zaman Belanda, Kebijakan Pendidikan Zaman Kemerdekaan, Kebijakan Pendidikan Zaman Reformasi). *Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 42–49.
- Samsuri. (2011). KEBIJAKAN PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN ERA REFORMASI DI INDONESIA. *Jurnal Cakrawala Pendidikan*, 2, 267–281.
- Supianah, E., Zuhdi, M., & Rusadi, B. E. (2026). Analisis Komprehensif Evolusi Kurikulum di Indonesia Pasca Reformasi : Studi Kasus KBK , KTSP , Kurikulum 2013 dan Kurikulum Merdeka. *Kasyafa: Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 3(1), 54–63.